

Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China dalam Menjadi *Security Orderer* di Asia Timur

Lalu Azhar Rafsanjani¹, Lalu Putrawandi Karjaya¹, Khairur Rizki¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Azharlalu0804@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe rivalry happening between the United States and China in term of becoming the regional security orderer of East Asia. This rivalry exist due to the East Asia's security complexity that is built up by the multipolar exist in the region as a result of the cold war. On the other hand, the cold war itself has become an opening for the United States to socialize the idea that they have the capacity of becoming a leader who can maintain peace in the region. This research uses a descriptive-qualitative approach, and data are derived from various secondary sources that is related to the analyzed issue. The writer collects literatures in the form of books, journals, documents, articles from media, which includes internet-based and printed. China nowadays experiences a great economy development after Xi Jin Ping implemented the open door policy. Through such development, China is able to modernize its capacity in order to counter the status quo hegemony. To win this war of position, China develops its military and spread the idea that they are able to replace the United States as a security orderer in the region. However, to bring the United States into the organic crisis, China needs more than just a military build-up.

Keywords: *Counter Hegemony, Rivalry, Security Orderer, War of Position.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai rivalitas yang terjalin antara Amerika Serikat (AS) dan China dalam menjadi *security orderer* di Asia Timur. Rivalitas ini terbentuk karena kompleksitas keamanan Asia Timur yang diakibatkan oleh perkembangan kekuatan pasca perang dingin. Di sisi lain, perang dingin sendiri telah memberikan ruang bagi AS untuk memberikan ide bahwa mereka adalah pemimpin yang dapat menjamin perdamaian. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan sekunder dari berbagai literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian. Dewasa ini, China mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan akibat dari kebijakan *open door policy* yang digagas oleh Xi Jin Ping. Hal tersebut memberikan China kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka menjadi *security orderer* atau *counter hegemony*. Dalam rangka memenangkan war of position, China mengembangkan militernya dan berusaha membangun ide bahwa mereka mampu menggeser posisi AS sebagai hegemoni *status quo*. Akan tetapi, untuk membawa AS pada kondisi *organic crisis*, China memerlukan pembangunan ide yang lebih matang dari sekadar modernisasi militer.

Kata kunci: *Counter Hegemony, Rivalitas, Security Orderer, War of Position.*

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Timur adalah kawasan yang dinamika hubungan antar negara di dalamnya sangat kompleks. Setiap negara dalam kawasan ini memiliki instrumen tersendiri dalam menunjukkan posisinya di kawasan. China adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar dan perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di dunia serta kemampuannya dalam memproduksi senjata sendiri. Kemudian, Jepang dan Korea Selatan memiliki tingkat keunggulan teknologi yang tinggi. Kekuatan nuklir Korea Utara juga tidak bisa dipungkiri dapat menjadi ancaman yang signifikan bagi setiap negara yang ada, khususnya negara-negara di kawasan ini (Calder & Ye, 2010, pp. 5–8). Selain itu, fakta sejarah, seperti pada Perang Dunia I dan II serta Perang Dingin menyebabkan negara-negara di kawasan ini sulit untuk percaya satu sama lain, misalnya penjajahan Jepang terhadap China dan Korea, Perang Korea, dan peristiwa lainnya.

Ketika Perang Dingin, diskursus tentang dilema keamanan hanya berfokus pada dinamika kekuatan dan interaksi antara dua negara dengan kekuatan militer yang setara, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketakutan yang terjadi adalah adanya kemungkinan terjadinya perang nuklir antara kedua negara pada awal 1980-an. Dilema tersebut dikenal dengan *'Hobbesian Fear'*, yaitu kondisi ketika negara adikuasa hanya bersikap defensif terhadap provokasi negara lain tetapi tindakan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain. Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain dikarenakan terdapat perbedaan interpretasi motif dan ancaman mengakibatkan terperangkapnya AS dan Uni Soviet dalam cengkraman permusuhan. Pada akhirnya, masing-masing negara membenarkan kebijakan militer berdasarkan persepsi ancaman dari kekuatan militer negara lain (Booth & Wheeler, 2007, pp. 4–5).

Seiring dengan semakin kompleksnya kekuatan di suatu kawasan, maka keamanan di kawasan tersebut akan menjadi kompleks juga. Hal ini karena keamanan bersifat saling mempengaruhi atau tidak dapat berdiri sendiri. Keamanan kawasan dipengaruhi oleh intervensi, interaksi, dan persepsi antara negara dalam kawasan tertentu maupun yang berada di luar kawasan. Dalam kawasan Asia Timur, keamanan suatu negara tidak bisa dipisahkan dengan keamanan negara lainnya, baik dalam skala kawasan maupun global, karena kawasan merupakan arena dimana keamanan nasional dan keamanan global saling berkaitan dan mempengaruhi (Buzan, 1991, p. 43). Untuk memahami bahwa keamanan nasional di kawasan Asia Timur tidak bisa terlepas dari keamanan global, Perang Dingin telah membuktikan bahwa persetujuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memberikan pengaruh signifikan terhadap ketegangan di Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, wilayah Asia Timur menjadi pusat perhatian internasional. Posisi strategis kawasan ini semakin bertambah penting karena terjadi persaingan antara Amerika Serikat, Jepang, dan China untuk mengusahakan kepentingan nasional masing-masing (Y. S. Yoon & Mas'oeed, 2010, p. 103). Berbeda dengan masa Perang Dingin, lingkungan politik internasional di wilayah Asia Timur jauh berkembang ke dalam berbagai macam bentuk sebagai akibat dari hubungan multilateral antara negara-negara berkepentingan tersebut yang mencoba melepaskan diri dari hubungan permusuhan dan konfliktual. Walaupun demikian, unsur-unsur konflik dan ancaman keamanan masih berlangsung di Semenanjung Korea seperti di masa Perang Dingin. Dalam hal ini, Semenanjung Korea merupakan faktor penting

dalam upaya mendorong perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Korea Selatan dan Korea Utara merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Timur, yang sangat penting sebagai penghubung antarnegara, terutama dengan Jepang, China, dan Rusia. Posisi geografis Semenanjung Korea yang strategis tersebut menyebabkan kedua Korea dalam sepanjang sejarah masing-masing sangat penting dari sudut strategi (Y. S. Yoon, 2010, p. 8).

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memberikan pemahaman terkait penelitian skripsi ini, penulis meninjau beberapa literatur tertentu mengingat secara umum literatur terkait penelitian skripsi ini sangat banyak dan bervariasi, khususnya yang membahas rivalitas kedua negara dalam menjadi pemimpin di Asia Timur. Salah satu tulisan yang penulis temukan terkait dengan isu ini adalah artikel dari Adi Rio Arianto yang berjudul *Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di NATO dan Implikasinya Terhadap Agenda Keamanan Global Pasca Integrasi Prancis di Struktur Militer NATO*. Dalam tulisannya ini, Adi mengungkapkan bahwa AS dan Prancis memiliki kedekatan dalam bidang militer, khususnya dalam NATO (Arianto, 2016). Di Perang Dingin, baik AS maupun Prancis memiliki tujuan yang sama, yaitu melawan perkembangan komunisme dan fasisme serta meredam perkembangan perlawanan yang dilakukan oleh Jerman.

Namun, arah kedekatan itu kemudian berubah mengingat Perang Dingin sebagai perang yang diatasi NATO telah berakhir. AS dikatakan tetap memainkan peranan penting dan bahkan menjaga NATO agar tetap berada di bawah kendalinya dalam rangka mempertahankan hegemoninya di dunia. Di lain sisi, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya memandang dominasi peranan AS sebagai sebuah penghambat untuk membangun Eropa yang mandiri. Pendapat itu membuat Prancis dan negara-negara Eropa lainnya muncul dengan perspektif *to make US under NATO* agar kerjasama aliansi yang telah terbangun dapat bertahan. Akan tetapi, pada faktanya AS tetap mengusahakan agar NATO berada di bawah kendalinya (*to make NATO under US*). Perlawanan kemudian muncul dari Prancis dalam bentuk penolakan untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer NATO, khususnya ketika pangkalan militer NATO dipindahkan dari Paris ke Brussel. Dari gambaran rivalitas tersebut, penulis berusaha menelaah pola pengambilan kebijakan AS dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dan pola dari ketahanan Prancis dalam menjaga konsistensinya untuk membangun rivalitas.

Selanjutnya, penulis meninjau artikel dari Alexei Arbatov yang berjudul *Engaging China in Nuclear Arms Control* (Arbatov, 2014). Di dalam tulisan ini, Arbatov berusaha untuk menjelaskan bahwa China memainkan peranan penting dalam mengontrol perkembangan nuklir di dunia. China dipercaya memiliki bargaining power yang kuat untuk memainkan peran tersebut mengingat perkembangan ekonomi yang dicapainya. Untuk meningkatkan peranannya tersebut, China dianggap tertarik menjadi pengganti dari Rusia sebagai pewaris kekuasaan US di masa lalu. Hal ini dinilai bahwa menggantikan peranan Rusia menjadi cara yang strategis dalam menyeimbangi kekuatan AS. Pendapat tersebut dinilai penulis menarik untuk melihat ambisi China dalam menjadi kekuatan penyeimbang atau bahkan hegemoni baru. Fakta menarik lain yang dijelaskan dalam tulisan ini adalah cara China dalam usaha modernisasi militernya, yaitu dengan cara mengembangkan misil balistik dan nuklir di

negaranya. Usaha tersebut dalam pandangan AS merupakan sesuatu yang mengancam. AS dengan konsep non-nuklirnya beranggapan bahwa penembangan nuklir yang dilakukan oleh negara mana pun harus diawasi dengan ketat karena AS beranggapan bahwa dirinya adalah polisi keamanan global. Asumsi itu membawa dirinya pada pengembangan senjata yang masif dan berkembangnya militer China membuat perkembangan militer AS semakin masif. Jadi, tulisan Arbatov ini membuka pikiran penulis mengenai perlombaan senjata yang terjadi di antara kedua negara tersebut dimana persoalan tersebut berawal pada usaha kedua negara tersebut dalam mengedepankan kepentingan nasionalnya.

Penulis juga meninjau artikel dari Felix K. Chang yang berjudul *A Salutation to Arm: Asia's Military Build Up, Its Reasons and Its Implications* (Chang, 2013). Tulisan ini memberikan gambaran mengenai perkembangan militer yang dilakukan oleh negara-negara di Asia, termasuk China. Perkembangan militer di Asia ini dikatakan Chang telah melebihi perkembangan militer negara-negara Eropa. China yang tadinya mengedepankan militer darat kemudian mengarahkan perkembangan pada angkatan laut dan udaranya. Tidak hanya China, negara-negara lain seperti Jepang, India, dan bahkan Indonesia juga melakukan hal yang sama. Perkembangan ini didasari oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Jadi, dengan adanya tulisan ini, penulis dapat melihat bagaimana suatu negara mampu melihat kekuatan atau power mereka untuk mengatasi ancaman yang datang, khususnya yang secara langsung mengancam keamanan nasional mereka. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan bagaimana negara-negara di Asia berafiliasi satu sama lain dalam suatu kondisi *arm race* agar kedaulatan dan atau kepentingan nasional mereka mampu terjaga dengan baik. Hal tersebut memberikan pandangan bagi penulis untuk melihat usaha AS untuk meredam kekuatan China dengan memanfaatkan aliansi atau jaringan yang dimilikinya di Asia Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta kepentingan AS dan China di Asia Timur dan bentuk rivalitasnya dalam bentuk tulisan kualitatif dengan memberikan analisa pengaruh rivalitas terhadap dinamika keamanan kawasan ini. Untuk mendukung tulisan ini, penulis mengutip data empiris bersifat sekunder dari berbagai literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian. Buku, jurnal, dan dokumen didapatkan dari Perpustakaan Nasional berbasis daring dan internet dalam bentuk literatur elektronik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memaparkan arti dari rivalitas dan bagaimana sebuah rivalitas terbentuk, penulis menggunakan beberapa konsep, seperti konsep kepentingan nasional yang penulis pilih untuk dapat menggambarkan tentang hal-hal yang melatar belakangi kepentingan dari setiap aktor dalam krisis tersebut; konsep *regional security complex* (RSC) akan penulis jadikan standar dalam pemaparan mengenai tingkat kompleksitas keamanan yang ada di dalam kawasan Asia Timur; dan konsep hegemoni sebagai instrumen penjelas dari status yang ingin dicapai melalui rivalitas

ini.

Terdapat beberapa ahli yang memberikan gambaran mengenai kepentingan nasional, seperti Yusuf S., Morgenthau, dan Holsti. Menurut Yusuf, kepentingan nasional akan bergerak secara dinamis mengikuti sudut pandang dari para elit yang berkuasa. Selain itu, kepentingan nasional juga harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat luas agar diterima sehingga dapat diturunkan menjadi sebuah kebijakan luar negeri yang bentuknya dapat berupa kerjasama, persaingan, dan atau konflik (Yusuf, 1989, p. 10). Di sisi lain, Morgenthau melihat kepentingan nasional sebagai sebuah dasar dari keberlangsungan suatu negara yang harus dicapai, baik dalam bentuk kerjasama atau paksaan (Mas'ood, 1990, p. 140). Kemudian, Holsti mendefinisikan kepentingan nasional ke dalam tiga bentuk, yaitu *core values* (sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara menyangkut eksistensi suatu negara); *middle range objectives* (tentang peningkatan derajat perekonomian suatu negara); *long range goals* (sesuatu yang bersifat ideal misalnya, keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia) (Bakry, 1990, p. 63). Secara garis besar, kepentingan nasional didasari pada hasrat keberlangsungan hidup (*survival*) dan kekuasaan. Selanjutnya, RSC merupakan gambaran yang diberikan Buzan untuk memahami polaritas kekuatan dalam tatanan global yang terbentuk pasca Perang Dingin. Dalam penjelasannya, Buzan berkata bahwa RSC adalah sebagai berikut:

“A set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another.” (Buzan & Weaver, 2003, p. 44)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam teori kompleksitas keamanan ini (dengan keterkaitan masalah keamanan yang sangat mempengaruhi proses sekuritisasi maupun desekuritisasi) terbentuk berdasarkan kawasan atau faktor kedekatan geografis. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pemikiran konstruktivis (menekankan pada dimensi konstruksi sosial) dan juga neorealis (menekankan pada distribusi kekuatan). Dengan adanya teori ini, penulis dapat melihat framework empiris dari keamanan regional.

Kemudian, Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni digunakan untuk menentukan kapabilitas dari sebuah kelas yang paling berkuasa atau berpengaruh dalam menjalankan dan mengatur kekuasaan yang bersifat non-koersif dengan menyebarkan nilai-nilai borjuis ke seluruh masyarakat. Dalam arti lain, konsep ini berusaha negara lain dimana negara yang berkuasa secara kolektif berusaha untuk menciptakan tekanan yang terkonstruksi agar negara-negara lain (Watson, 2002, p. 1). Maksud dari tekanan yang terkonstruksi tersebut adalah tekanan yang dapat dilestarikan karena berlandaskan persetujuan masyarakat. Dalam menciptakan tekanan, suatu negara biasanya menggunakan perangkat kerja *law enforcement* atau perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan dengan sifat memaksa. Perangkat kerja tersebut biasanya dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi, dan bahkan penjara. Namun, perangkat kerja ini menghasilkan tekanan yang bersifat sementara karena hanya dapat membuat suatu negara mendominasi negara-negara lainnya dimana negara-negara lain tersebut dapat secara langsung berada di bawah kendali mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DOMINASI AS SEBAGAI KUNCI KETIDAKPASTIAN

Intervensi AS di Asia Timur dimulai sejak kalahnya Jepang dari AS di Perang Dunia II. Saat itu, AS langsung mengirimkan *Supreme Comando for the Allied Powers* (SCAP) untuk mengambil alih kontrol atas Jepang secara penuh, tidak terkecuali pada aspek pertahanan dan keamanan Jepang. Pengambilan kontrol tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang yang berbunyi:

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as war potential, will never be maintained. The right belligerency of the state will not be recognized.” (Tsuciyama, 2000, p. 137)

Pasal di atas menunjukkan bahwa AS benar-benar berhasil mengambil alih Jepang yang pada saat itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penolakan. Kedudukan AS di Jepang pun dimulai dengan membentuk *Self Defense Force* sebagai lembaga yang mengatur militer Jepang. Tidak hanya itu, SCAP kemudian juga turut ikut campur dalam Perang Korea pada 1951 untuk membantu Korea Selatan yang sedang diinvasi Korea Utara (Tsuciyama, 2000, p. 137). Intervensi AS tersebut berhasil membawa kemenangan di pihak Korea Selatan dan peristiwa ini menunjukkan dimulainya aliansi antara AS dengan Korea Selatan. Hal tersebut mendorong AS untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan investasi yang luar biasa pada kapal selam, kapal induk, nuklir, senjata konvensional, dan menjaga lebih dari 100.000 tentara AS di Asia yang kebanyakan berbasis di Jepang dan Korea (Dosch, 2004, p. 18).

Setelah itu, AS dan Jepang menandatangani pakta perdamaian San Fransisco sebagai bentuk kepercayaan terhadap aliansi. Namun, AS sebenarnya tidak benar-benar melepaskan Jepang karena Jepang hanya diberikan kebebasan di dunia politik. Sedangkan di ranah militer, Jepang berfungsi sebagai satelit militer AS yang mewajibkan Jepang menjadi *nuclear umbrella* bagi AS. Dalam pakta ini, AS dapat mendirikan pangkalan militer yang didahului dengan konsultasi dengan pemerintahan Jepang dan hingga kini AS sudah memiliki pangkalan militer di Okinawa serta sedang proses pembebasan pulau Mageshima untuk dijadikan pangkalan militer AS. Di lain sisi, militer AS memiliki kewajiban untuk menjaga pertahanan Jepang. Jepang pun kemudian dianggap sebagai pemain kunci dalam papan catur strategi pertahanan dan keamanan dari *America’s Global Cold War* (Dosch, 2004).

Setelah Jepang, AS berusaha untuk mengambil peran dalam membatasi pergerakan Uni Soviet di Semenanjung Korea. AS, yang sejak 1945 berhasil menduduki Korea bagian Selatan, memutuskan untuk mengirimkan SCAP yang ada di Jepang agar turut serta dalam Perang Korea 1951 yang terjadi antara Korea Selatan (*Republic of Korea*) dan Korea Utara (*Democratic’s People Republic of Korea*). Bantuan yang dikirimkan AS ke Korea Selatan tersebut pada akhirnya menghasilkan kemenangan di sisi Korea Selatan dimana pasukan Korea Utara berhasil dipukul mundur. Sejak saat itu, wilayah Semenanjung Korea dibagi secara resmi dimana *Demilitarize Zone* (DMZ) menjadi perbatasan di antara keduanya. Selain itu, berkat peranan yang diambil AS ini, Korea Selatan menjadi percaya kepada

AS dan keduanya melakukan perjanjian militer agar dapat saling melindungi kepentingan masing-masing.

Setelah dua kejadian di atas, AS membentuk beberapa perjanjian bilateral untuk menjaga eksistensinya di kawasan ini. Dengan Jepang, AS membentuk *San Fransisco Treaty* dan *Japan-US Security Treaty*. Dalam kedua perjanjian tersebut, berisi tentang kewajiban Jepang dalam mengembalikan wilayah okupasi dan kewenangan AS untuk tetap memiliki pangkalan militer disana dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kawasan dan global. AS memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan: (1) untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur Jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2) setelah berkonsultasi, AS dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Jepang (Jack & Olton, 1999, p. 152). Kemudian, dengan Korea Selatan, AS membentuk *Mutual Defense Treaty* yang berisi tentang kesepakatan keduanya dalam menjaga perdamaian internasional, kewajiban untuk berdiskusi dalam mengambil tindakan dari ancaman ketika salah satu atau keduanya merasa terancam, dan diizinkan angkatan militer AS (darat, laut, maupun udara) untuk beroperasi di wilayah administrasi Korea Selatan (Yale Law School, 1953).

Selain itu, AS bahkan turut mengambil tindakan terkait dengan status Taiwan. Ketika Taiwan direncanakan diserang oleh China pada tahun 1950, AS mengerahkan *7th Fleet*-nya untuk mencegah hal tersebut (Rachmat, 2017, p. 136). Dengan kebijakan *Taiwan Relations Act*, AS menjadi salah satu pemasok senjata utama bagi Taiwan dalam rangka menjaga perdamaian dan pembangunan pertahanan bagi Taiwan (American Institute in Taiwan, 1979). Menurut *Bill Clinton*, peranan AS dalam kawasan ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan *engagement and enlargement* yang berisi: (1) Memperkuat persatuan kawasan melalui pembangunan aliansi; (2) Mempertahankan kehadiran kekuatan militer AS di Asia Timur; dan (3) Membangun institusi regional (Cato Handbook for Congress, 2002, p. 551).

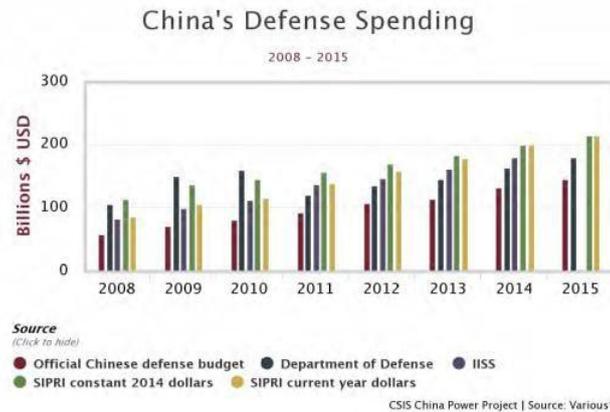
Hingga kini, AS memiliki kekuatan militer yang mumpuni di Asia, khususnya di Asia Timur, melalui penempatan angkatan militernya di beberapa negara aliansi. Sekitar 70.000 angkatan militer yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan marini berada di kawasan Asia-Pasifik. Jumlah ini menempatkan kawasan Asia, khususnya Asia Timur, sebagai kawasan kedua dengan jumlah angkatan militer AS terbanyak di dunia. Untuk lebih rincinya, berikut adalah peta persebaran angkatan militer AS di kawasan Asia-Pasifik.

KEBANGKITAN CHINA DAN AMBISINYA DALAM MEMIMPIN REGIONAL

Kehadiran China sebagai *counter-hegemony* didasari pada pengalaman pahit dimana China mengalami kekalahan dari AS pada Krisis Taiwan 1949-1950 dimana saat itu AS melakukan *gunboat diplomacy* dengan mengirim *US 7th Fleet*-nya ke Taiwan. Ketika Deng Xiao Ping mulai menjabat sebagai presiden dari China, China mulai mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi sebagai akibat dari implementasi kebijakan *open door*. Kebijakan tersebut membuat China menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing yang kemudian mempengaruhi modernisasi industri di China sehingga China dapat tumbuh menjadi negara industri yang mandiri. Secara

berkelanjutan, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik (Chow, 2011, p. 31). Berdasarkan kondisi China sekarang, terlihat bahwa China sudah berhasil melewati Eropa dan mulai menyamai Amerika Serikat.

Grafik 1. Pendapatan Perkapita China (dalam triliun USD)



Sumber: (Kumpulan Studi-Aspirasi, 2017)

Dengan perkembangan ekonomi di atas, China terus meningkatkan anggaran belanja militernya. Hal tersebut dipicu oleh rentannya keamanan kawasan Asia Timur, sikap AS yang ingin *re-balancing* China di kawasan, aliansi AS-Jepang yang semakin kuat, dan keinginan China untuk menjaga kawasan-kawasan sengketa sebagai wilayahnya, seperti Taiwan, Laut China Timur, dan Laut China Selatan. Bahkan China memulai modernisasi militernya dengan serius setelah krisis Selat Taiwan tahun 1995-1996, karena insiden tersebut secara tidak langsung memperlihatkan kelemahan China untuk mencegah intervensi asing dalam perselisihan kedaulatan China. Sehingga modernisasi militer dapat menjadi cara untuk menegaskan kembali posisinya terhadap Taiwan agar pihak asing sulit mengintervensi masalah internalnya. Selain itu, peningkatan kekuatan pertahanan menjadi penting bagi China untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi-potensi ancaman baik dari internal maupun eksternal.

Grafik 2. Perbandingan Pengeluaran Militer China Tahun 2008-2015 menurut Pemerintahan China, Departemen Pertahanan AS, IIS, dan SIPRI



Sumber: (China Power, n.d.)

Kondisi perekonomian China yang kuat dapat mendukung proses *military build-up* dan *arms build-up* dalam militernya, dan sebaliknya modernisasi dan peningkatan kapabilitas militer penting untuk menjamin keamanan internal dan eksternal bagi kelangsungan aktifitas ekonominya. China bertujuan membentuk tentara PLA yang berkekuatan lebih modern untuk mendukung kepentingan nasionalnya baik secara domestik maupun internasional, dan juga untuk menghalau dan melawan ancaman-ancaman militer lainnya yang datang dari luar. Melalui kekuatan militer China tidak hanya dapat mengontrol kekuasaan atas wilayahnya sendiri tapi sekaligus untuk meningkatkan kekuatan pertahanan untuk menghadapi adanya potensi ancaman dari luar. Dengan kapasitas yang ada, China ingin menciptakan kekuatan militer yang mampu memproyeksikan kekuatan terbatas di seluruh domain, dengan mengkombinasikan '*nearseas defense*' dan '*far seas protection*', yang menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan angkatan laut terbatas (Sullivan & Erickson, 2015). Sejak 2012 China memang lebih berfokus pada manajemen strategis maritimnya, sehubungan dengan isu-isu persengketaan wilayah yang melibatkan China seperti di Laut China Selatan dan sengketa pulau Senkaku/Diaoyu dengan Jepang. China melihat pentingnya kekuatan maritimnya untuk mendukung upaya penegakan atas wilayahnya. Sesuai dengan strategi pertahanan dan mempertimbangkan kondisi geografisnya, China lebih menitik beratkan pertahanannya ke wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik dan sengketa dengan negara tetangga, terutama di daerah yang berbatasan dengan wilayah laut internasional seperti Laut China Timur dan Laut China Selatan. Bagi China, menjaga kedaulatan adalah di atas segalanya karena kedaulatan dianggap menjadi pendukung dari keinginan mereka untuk memenangkan *war of position*.

Peningkatan anggaran pertahanan yang selalu meningkat dan keinginan China untuk menciptakan prestise dan *bargaining position* di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Timur, membuat perkembangan pesat juga terhadap alutsista PLA. Modernisasi alutsista militer yang dilakukan China sudah mencakup teknologi-teknologi canggih seperti kemampuan C4ISR (*command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, dan reconnaissance*). Selain bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional sebagaimana penjelasan sebelumnya, modernisasi militer ini dianggap penting untuk meningkatkan kemampuan personel militer PLA. Hal tersebut juga sesuai dengan anggapan China dewasa ini bahwa kualitas personel adalah lebih penting daripada kuantitas. Dalam dua dekade lebih, China telah berhasil mengubah imej PLA menjadi pasukan dengan kekuatan militer yang profesional dan kompeten serta mampu menjadi salah satu yang terkuat di dunia yang mana sebelumnya PLA dikenal sebagai *junkyard army* atau militer dengan alutsista yang tidak mumpuni.

RIVALITAS AS-CHINA

Selama ini, pemerintah AS memperhatikan perkembangan China dan memberikan perhatian terhadap kemajuan China dalam bidang ekonomi dan militernya. Dalam laporan *Quadrennial Defence Review Report* dikatakan bahwa China mempunyai potensi untuk menjadi kompetitor militer AS dengan modernisasi dan peningkatan kapabilitasnya (Departemen Pertahanan AS, 2006b, p. 41). Pemerintahan AS melihat China sebagai kompetitor yang strategis. Condoleezza Rice, sekretaris

negara AS di masa pemerintahan Bush, menyatakan meski terdapat argumen kerjasama ekonomi dengan China, China masih merupakan ancaman potensial bagi stabilitas di wilayah Asia Timur. Menurut Rice, kekuatan militer China dewasa ini tidaklah sebesar AS, tetapi kondisi tersebut tidaklah permanen. China adalah kekuatan besar dengan kepentingannya terutama dalam masalah Taiwan, Laut China Selatan, dan Laut China Timur. Selain itu, perkembangan militer China juga didukung oleh adanya perasaan terganggu atas kehadiran AS di Asia Pasifik. Dalam artian lain, China ingin menjadi kekuatan penyeimbang di Asia Timur. Posisi tersebut menunjukkan kepada AS bahwa China lebih cocok dikatakan sebagai kompetitor strategis daripada rekan strategis. Selain itu, kerjasama yang erat antara China dengan Iran, Pakistan dalam hal teknologi rudal balistik semakin memperkuat asumsi di atas (Rice, 2001, p. 56).

Keadaan kemudian menjadi semakin kompleks melihat kondisi dimana perasaan terancam terhadap China di atas tidak hanya dirasakan oleh kalangan elite saja, melainkan sipil pun merasa terancam. Dalam survei *Haris Poll* menunjukkan bahwa mayoritas responden di Eropa mempersepsikan China sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas global. Di Amerika Serikat, 31 persen responden memandang China sebagai ancaman terbesar dunia, 54 % percaya bahwa kehadiran China akan mendominasi dunia melebihi Iran dan Korea Utara yang sempat dikatakan Presiden Bush sebagai bagian *Axis of Evil*. Masyarakat Amerika mempercayai bahwa besarnya investasi China yang masuk ke negaranya akan mampu membawa China menjadi *super power* yang berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan negaranya (Reid, 2005, p. 1).

Selama ini, AS memelihara kerjasama bilateral terkait aliansi pertahanan dengan beberapa negara Asia Timur untuk membendung ekspansi komunis di Asia selama periode PD II dan Perang Korea. Namun, laporan *Quadrennial Defense Review* (QDR) 2006 yang menyebutkan bahwa kekuatan militer China mempunyai potensi yang paling besar untuk bersaing dengan AS membuat AS harus lebih waspada. Sampai saat ini, AS sudah melakukan sejumlah inisiatif pada level strategis untuk memperhatikan peningkatan keamanan regional, termasuk diantaranya Inisiatif keamanan dengan Australia dan Jepang, pembukaan kerjasamadengan India, peningkatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan beberapa perubahan kebijakan lainnya dalam rangka konfigurasi lebih baik bagi kerjasama di wilayah. AS, Jepang, dan Australia bertemu di Sydney pada 18 Maret, 2006 untuk menyelenggarakan dialog strategis trilateral para menteri. Ketiga negara menyetujui menjaga stabilitas dan keamanan secara global dengan fokus khusus di daerah Asia Pasifik. Dalam *Joint Statement* tersebut akan ditingkatkan kerjasama keamanan di antara negara. Dialog tersebut juga membicarakan konsolidasi demokrasi dan memperkuat kerangka kerjasama di wilayah Asia-Pasifik. Dalam kaitan dengan inisiatif keamanan trilateral ini, Rice, menyatakan semua pihak di kawasan memiliki tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk mencoba dan menghasilkan kondisi yang lebih baik dengan mengajak China menjadi kekuatan positif dalam politik internasional (Tow & Acharaya, 2007, p. 23). India dan AS mengeluarkan pernyataan bersama pada Maret 2006 terkait dengan kerjasama melawan ancaman bersama yang disebabkan oleh kurangnya toleransi, terorisme, serta penyebaran senjata pemusnah massal dan mengungkapkan harapan usaha mereka untuk memberikan pengaruh yang positif atas

masa depan sistem internasional. Pemerintah Bush juga mendukung India sebagai kekuatan utama di regional dan mengembangkan hubungan strategis dengan India sebagai usaha untuk berkembang untuk mengimbangi China.

Melalui USINDOPACOM, AS meningkatkan kerjasama militernya dengan negara-negara aliansinya, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia. AS juga melihat beberapa partner strategis yang dianggap mampu membantu mereka dalam menjaga hegemoni dari China di Asia Timur. Hal ini dianggap perlu mengingat realita memperlihatkan bahwa aliansi AS berpotensi mendapat ancaman militer dari China dan Korea Utara. Potensi ancaman militer dapat datang dari China terhadap Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku. Selain itu, kekuatan China di LCS dianggap sebagai ancaman kedaulatan bagi Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sedangkan pada isu Korea Peninsula, ancaman nuklir Korea Utara yang didukung China dianggap dapat menghancurkan stabilitas keamanan Asia Pasifik. Melihat realita ini, AS merasa perlu melakukan gelar kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik untuk melindungi aliansinya dan menunjukkan kehadirannya. Di Jepang, AS meningkatkan investasi militernya melalui beberapa hal, seperti:

1. Peningkatan fasilitas *air base*

Bersama Jepang, AS telah melakukan pembangunan pangkalan udara atau *air base* agar pesawat-pesawat tempur AS memiliki tempat yang mumpuni. Saat ini, ada beberapa pangkalan udara yang dimiliki AS di Jepang, seperti Misawa dan Kadena. Dengan adanya pangkalan udara ini, AS mampu menempatkan sekitar 130 *air forces fighters*-nya (Hardy, 2013).

2. Pengembangan kapabilitas *anti submarine war craft* (ASW)

Saat ini, pengembangan kekuatan maritim menjadi prioritas Jepang dan AS melalui pengadaan ASW yang modern untuk mendeteksi, menelusuri, dan menghancurkan musuh. ASW merupakan bagian dari kekuatan tempur maritim yang terdiri dari kapal tempur, pesawat tempur, dan kapal selam. Pada tahun 2009, Jepang melakukan pengadaan ASW Two Kawasaki P-1 Patrol Maritime untuk mendukung program C4ISR (*Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*) yang ditetapkan oleh AS. Melalui pengembangan ASW, maka AS bersama Jepang akan mampu menyeimbangi kekuatan maritim China yang saat ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini China merupakan ancaman Jepang dan AS, karena China juga melakukan investasi yang besar dalam melakukan pengembangan ASW untuk meningkatkan kekuatan tempurnya (Apthrop, 2012).

Dengan Korea Selatan, AS melakukan investasi militer dalam bentuk pembangunan sarana dan infrastruktur militer, transfer teknologi dan pengetahuan militer. Secara kontinu, AS melakukan pengembangan *ground forces* di Korea Selatan. *Ground forces* memiliki peranan penting bagi kekuatan tempur darat AS. Melalui pengadaan infanteri, kavaleri, artileri, dan berbagai alat tempur darat lainnya, AS berusaha untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman yang ada, khususnya Korea Utara. Pengembangan *ground forces* di Korea Selatan dimulai sejak tahun 2010, dibawah komando Gen. James D. Thurman (AS) dan Gen. Jung Seung Jo (Korea Selatan). Selanjutnya, AS turut mengembangkan fasilitas pangkalan udara di Korea Selatan. Lapangan udara yang dikembangkan AS bersama Korea Selatan adalah *US 7th Air Force Headquarters* di Osan. Keberadaan fasilitas tersebut merupakan hal vital

karena AS saat ini tengah menempatkan pesawat tempur F-16x40 sebanyak 60 unit dengan personel sebanyak 8,000 pasukan udara di Osan. Melalui kekuatan udara yang canggih, maka AS dapat melakukan pengintaian terhadap perkembangan yang terjadi di Korea Utara. Kerjasama dengan Korea Selatan ini memang dikatakan sebagai bentuk pertahanan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dimana ancaman nuklir Korea Utara memang telah menjadi ketakutan sejak lama bagi Korea Selatan dan salah satu penyebab kompleksnya keamanan di Asia Timur. Melalui keterlibatannya ini, AS setidaknya dapat mewujudkan citra sebagai negara aliansi yang baik sehingga mendapat kepercayaan negara-negara sekutunya sebagai *security orderer* di kawasan (Praditya, 2013, pp. 20–21).

Dalam hal ini, AS juga melihat pentingnya pengambilan peran di Taiwan mengingat Taiwan memiliki ikatan yang paling dekat dengan China dibandingkan negara-negara Asia Timur lainnya. AS mulai melakukan pengembangan *anti ship cruise missiles* (ASCMs) di Taiwan. Pengembangan kekuatan misil ini merupakan salah bentuk upaya AS dalam menghadapi hegemoni China. Saat ini China telah membuat lebih dari 1,000 misil balistik dan ASCMs dianggap perlu oleh AS dalam rangka menyeimbangkan pengaruh China di perairan Taiwan. AS juga turut memanfaatkan kedekatan diplomatiknya dengan Taiwan. Taiwan dewasa ini dikenal sebagai prodaktor kapal selam militer di Asia Timur. Melalui kedekatannya tersebut, AS mendorong usaha industri militer Taiwan tersebut dengan membeli delapan unit kapal selam militer berkekuatan diesel yang kemudian ditempatkan di selat Taiwan (Praditya, 2013, p. 22). Hal ini dilakukan AS sebagai bentuk pertahanan terhadap perkembangan China yang masif.

Selain hal di atas, AS juga melakukan pengembangan *terminal high altitude area defense* atau THAAD di Jepang dan Korea Selatan. THAAD merupakan sistem pertahanan anti misil balistik yang dikembangkan oleh *Lockheed Martin Corp*, sebuah industri pertahanan milik AS. Secara spesifikasi, THAAD terdiri dari 5 komponen utama, yakni: 1) peluncur; 2) misil; 3) pengendali tembakan; 4) radar; dan 5) perlengkapan pendukung. Pemasangan THAAD ini sebenarnya dikatakan AS sebagai bentuk pertahanan bagi negara-negara sekutu dan populasi mereka yang ada di negara-negara sekutu tadi dari ancaman nuklir Korea Utara. Namun, kondisi THAAD yang dilengkapi dengan radar terbaik yaitu *Army/Navy Transportable Radar Surveillance* (AN/TPY-2) dimana radar ini mampu menjangkau dari ratusan kilometer sampai 3000 kilometer membuat China merasa terusik. Dalam skala yang luas, strategi keamanan AS, menurut Presiden Bush didasarkan pada dua hal; *pertama*, mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemanusiaan serta mengakhiri tirani. *Kedua*, promosi demokrasi. Melihat hal tersebut, China merasa bahwa AS melakukan tindakan yang konfrontatif terhadap usahanya dalam menggeser AS menjadi hegemoni.

China yang selama ini mengembangkan *Intercontinental Range Ballistic Missiles* (ICBM) menganggap bahwa THAAD yang ditempatkan di Korea Selatan merupakan sebuah ancaman besar sehingga China kemudian memberikan respon berupa blokade ekonomi terhadap Korea Selatan. Pada saat itu, China berhasil menekan Korea Selatan dimana Korea Selatan mengalami pemerosotan ekonomi. Ekspor makanan Korea Selatan ke China menurun menjadi 5.6% dari tahun ke tahun pada Maret 2017. Penjualan mobil oleh Hyundai dan Kia juga mengalami penurunan

sebesar 57% sejak adanya pemboikotan oleh konsumen sendiri. Selain itu, wisata Korea juga mengalami pemerostan drastis di masa itu dimana 47% dari seluruh wisatawanannya berasal dari China. Pada akhirnya, Korea Selatan tidak melanjutkan proyek pengembangan THAAD demi memulihkan ekonominya pasca diembargo China (Kim & Jourdan, 2017). Meskipun demikian, THAAD yang sudah terpasang tetap ditempatkan di Korea Selatan, tepatnya di Seongju, Gyeongsang Utara.

Kemudian, China mengambil langkah serius melalui kebijakan *active defense*. *Active defense* sendiri merupakan persiapan postur kekuatan secara aktif untuk pertahanan diri dari segala ancaman terhadap kepentingan. Dalam hal ini, yang dilakukan China adalah mempertajam dan memperkuat keamanan lingkungannya serta mencegah musuh atau pihak lawan melakukan tindakan yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan China. Di bawah strategi ini, China seharusnya tidak memicu perang atau agresi kecuali untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial. Meskipun begitu, strategi ini tidak sepenuhnya bersifat defensif di bawah jargon "*three attacks, three defenses*" yang berarti bahwa China akan menjaga keseimbangan antara kemampuan defensif dan ofensif yang dimilikinya. Secara umum, strategi China dalam penggunaan seluruh kemampuan dan kekuatan negara memiliki dua tujuan, yaitu membangun keseluruhan *comprehensive national power* (kekuatannya jika dibandingkan dengan negara lain) dan meningkatkan *national power* (untuk mempertahankan kedaulatannya).

Pada implementasinya, China melakukan perluasan strategi yang didasarkan pada *White Defense Paper* 2010 dimana pertahanan yang dilakukan China memiliki empat tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan dari pembangunan nasional; 2) menjaga keselarasan dan stabilitas sosial; 3) mempercepat modernisasi pertahanan dan angkatan bersenjata nasional; dan 4) menjaga perdamaian dan stabilitas dunia (Departemen Pertahanan AS, 2010). Kemudian, China menggunakan konsep *people's war* sebagai doktrin militernya untuk mengambil dukungan sipil. Konsep tersebut dapat dimaknai sebagai pertahanan daratan yang mengkominasikan operasi dari pasukan *regular* dan *irregular* (antara tentara dan rakyat). Secara operasional, konsep ini jugadimaknai dengan mobilitas dan taktik layaknya perang gerilya (Huang, 2001, p. 132).

Strategi, misi, dan doktrin militer yang ditetapkan China tersebut kemudian berimplikasi pada pola peperangan dan operasi militer dari angkatan darat, laut, dan udara. Dalam konteks *naval warfare*, China menggunakan komponen *active defense* atau *offshore defense* sebagai konsep strategis agar PLA-Navy selalu siap dalam menjalankan operasinya di berbagai wilayah. Dalam hal membendung hegemoni AS di Asia Timur, China menjadikan *yellow sea*, LCT, LCS, dan Taiwan sebagai wilayah fokusnya. China kemudian memperluas fokus wilayahnya hingga ke Laut Filipina dan sekitarnya atas dasar perkembangan kepentingan komersial dan diplomasi. Cakupan wilayah ini kemudian dikenal sebagai *first island chain* dan *second island chain*. Dalam menjaga kepentingannya di wilayah tersebut, China melakukan operasi militer yang fokus pada enam hal *offensive and defensive campaigns*, yaitu *blockade*, *anti-sea lines of communication*, *maritime-land attack*, *anti-ship*, *maritime transportation protection*, dan *naval base defense* (Departemen Pertahanan AS, 2006a, p. 15).

Jika melihat lebih jauh, LCS mengalami pengembangan yang begitu pesat sebagai bagian dari wilayah klaim China dan *island chain*. Terdapat tujuh pangkalan

militer yang mapan dibangun untuk menampung armada laut dan udara dari PLA. Pangkalan-pangkalan militer tersebut memiliki kapabilitas, seperti armada dengan *long-range sensor*, pelabuhan, landasan pacu, penyimpanan bahan bakar, dan persenjataan. Dalam hal ini, Presiden Xi Jin Ping memang tidak menyebutkan bahwa pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Spratly tersebut bukanlah untuk memicu konflik, melainkan untuk menjaga keamanan maritim kawasan dan bantuan ketika terjadi bencana alam (Stashwick, 2019). Namun, kondisi dimana China mengakuisi LCS secara sepihak berdasarkan konsep *nine dash line*-nya dan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tata laut internasional yang telah diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan pernyataan Presiden Xi Ji Ping tersebut, secara tidak langsung, menunjukkan tingginya hasrat China untuk menjadi pemimpin di Asia Timur.

Pembangunan kapasitas militer yang mumpuni di LCS dianggap sangat penting mengingat LCS memiliki lokasi yang strategis bagi pertahanan China. Dengan adanya militer di LCS, khususnya di Kepulauan Spratly, China akan mampu menekan ancaman yang akan datang, khususnya dari U.S 7th Fleet yang kerap berpatroli di wilayah perairan Asia Timur. Sikap asertif China dalam LCS ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa alasan sebagai berikut: 1) Aliansi AS-Jepang, China memandang bahwa *containment policy* AS masih berlaku. Oleh karena itu, China mempertahankan kontrol terhadap wilayah-wilayah lautan agar wilayahnya “tidak tertutup”; 2) Wilayah LCS bersifat strategis sehingga kehadiran China di kawasan tersebut dapat meningkatkan posisinya terhadap pihak AS maupun Jepang; 3) Kehadiran China di LCS dapat menjadi pendorong terhadap ASEAN agar mendekati China dan tidak terlalu condong ke pihak AS dan atau sekutunya; dan 4) Penyelesaian masalah klaim tumpang tindih di LCS dapat menjadi preseden bagi sengketa maritim China lainnya yaitu dengan Vietnam dan Jepang, sehingga China tidak boleh bersikap lemah dalam persoalan ini.

Di sisi lain, untuk memperkuat bahwa China adalah negara yang cocok untuk menggantikan hegemoni *status quo*, China turut melakukan pembentukan ide melalui beberapa proyek, seperti *Made in China 2025* dan *One Belt One Road* (OBOR) *Initiative*. Proyek-proyek tersebut mempertegas kepada negara-negara di kawasan bahwa modernisasi militer yang dilakukan mereka adalah untuk menjamin perkembangan ekonomi kawasan dalam rangka membentuk stabilitas keamanan regional. Untuk memperkuat tujuan di atas, China menyadari bahwa perlu bagi dirinya untuk membuat diri menjadi negara yang sejahtera, kuat, demokratis, beradab, harmonis, serta negara sosialis yang modern dan cantik. China mempercayai dengan hal tersebut mereka dapat menggeser hegemoni *status quo* dan membentuk konsep keamanan regional baru, yakni keamanan regional tanpa aliansi (Departemen Pertahanan AS, 2019, pp. 2–3).

Merespon hal di atas, Komando pertahanan AS di Australia kemudian ditingkatkan AS sebagai pendukung dari usaha *rebalancing* China di Asia Timur. Saat ini, Darwin dijadikan sebagai kawasan pengembangan angkatan laut AS dimana 2.500 pasukan angkatan lautnya ditempatkan di kawasan ini. Obama mengatakan bahwa penempatan pasukan tersebut merupakan strategi AS dalam mengembangkan kekuatan maritimnya di kawasan Asia Pasifik. Penempatan pasukan angkatan laut merupakan program berkelanjutan sampai dengan tahun 2016 dengan biaya 1,6 miliar

USD per tahunnya. Penempatan pasukan AS tidak lepas dari bantuan dari Australia yang mau menyediakan tempat latihan militer bagi pasukan marinir AS. Apabila tidak ada bantuan pinjaman kawasan, maka besar kemungkinan biayanya akan sangat tinggi. Selain itu, AS juga melakukan pelatihan ASW dimana 1.000 personil Australia dan 8.000 personil AS melakukan latihan militer ASW di kawasan pantai utara Australia. Kedua pasukan militer masing-masing saling memberikan kontribusi atas pengetahuan dan ilmu militer. Pelatihan ini turut mengikutsertakan beberapa kapal dan rudal tempur seperti (1) *Aircraft Carrier* USS George Washington/CVN 73; (2) *Carrier Air Wing*/CVW 5; (3) *Guided-missile Cruiser* USS Antietam/CG54; (4) *Guided-missile Destroyer Lassen*/DDG 82; dan (5) *RAN Guided-missile Frigate* HMAS Sydney (FFG 03) (America's Navy, 2013).

ARAH KEAMANAN DI ASIA TIMUR

Kekuatan China yang telah terbentuk kini memang telah memberikan pengaruh besar bagi China dalam membentuk hegemoni di Asia Timur. Selain itu, kemampuan China dalam melakukan perdagangan bebas juga menambah kekuatan yang ada. Dapat dikatakan bahwa setiap negara di kawasan memiliki hubungan interdependensi dalam bidang ekonomi dengan China. Dengan itu, China semakin disegani oleh negara-negara Asia Timur. Bahkan negara-negara aliansi AS pun tidak bisa sembarangan menerima bantuan mengingat kekuatan yang dimiliki China saat ini.

Meskipun demikian, AS dapat dikatakan masih mampu memilah langkah yang sesuai untuk me- *rebalancing* China. Melihat beberapa cara ofensif tidak terlalu efektif dalam menghadapi China, seperti pada kasus pemasangan THAAD di Korea Selatan dan patrol di perairan sekitar Taiwan, AS pada akhirnya lebih memilih langkah-langkah yang bersifat defensif. Melalui diplomat-diplomat unggulnya, AS mampu melakukan diplomasi dan menciptakan kerjasama-kerjasama strategis dengan sekutunya, seperti Jepang, Taiwan, Australia, dan bahkan India sebagai upaya untuk menghalau China menjadi negara yang mendominasi di kawasan. Kerjasama bersifat defensif yang diciptakan AS ini berusaha untuk membuatsituasi bertahan pada usaha *balance of power* antara China dan AS. AS ingin menunjukkan citra bahwa mereka adalah wujud dari polisi dunia yang baik dimana mereka terlibat aktif dalam kawasan untuk menjaga perdamaian internasional. Cara ini membuat AS mampu mempertahankan *status quo* dan menghindari perang dengan China.

Di sisi lain, kemajuan ekonomi yang dialami China dipandang tidak merata sehingga perekonomian China masih dikategorikan berkembang. Belum meratanya pembangunan di China menyiratkan bahwa pengambilan keputusan untuk membelanjakan anggaran negaranya di bidang militer dengan jumlah yang tinggi sebagai sebuah keputusan yang tidak tepat guna. Bahkan, kondisi masyarakat China saat ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu kelompok konservatif dan kelompok moderat. Kelompok konservatif dipengaruhi oleh pemikiran politik dan ekonomi Mao Zedong sedangkan kelompok moderat dipengaruhi oleh pemikiran politik dan ekonomi Xi Jin Ping. Kemudian, kondisi China yang menganut komunisme membuat masyarakat di Asia Timur tidak benar-benar mempercayai China untuk menjadi pemimpin di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa China sendiri memiliki dinamika keamanan yang kompleks di internalnya yang kemudian membuat keamanan regional menjadi lebih kompleks.

KESIMPULAN

Asia Timur merupakan kawasan dengan dinamika keamanan yang sangat kompleks. Di kawasan ini, negara-negara yang ada merupakan negara-negara yang memiliki kekuatan besar, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Taiwan. Sebelum Perang Dunia II berlangsung, pola *enmity* dan *amity* di kawasan ini telah berkontribusi banyak terhadap distribusi kekuatan yang ada. Misalnya, Jepang di Perang Dunia I melakukan ekspansi ke negara-negara di sekitarnya yang menyebabkan terbentuknya *enmity* antara Jepang dengan negara-negara yang dijajahnya. Hal tersebut membuat munculnya dorongan bagi negara-negara yang terjajah untuk membentuk *amity* agar mampu menyeimbangkan dinamika keamanan yang ada. AS kemudian muncul di kawasan ini pada Perang Dunia II sebagai sebuah kekuatan baru yang membuat dinamika keamanan yang ada semakin kompleks.

Kontribusi AS di kawasan sejak Perang Dunia II tersebut pada akhirnya membentuk polaritas kekuatan yang ada di masa kini. Melalui berbagai perjanjian yang dibentuknya bersama-sama dengan negara-negara di kawasan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, AS muncul sebagai pemimpin di kawasan ini. Jika dikaitkan dengan paparan Gramsci mengenai hegemoni, AS dapat dinyatakan sebagai *ruling power* dengan kekuatan yang kuat. Tidak hanya karena AS mendominasi secara koersif (menguasai elit politik), melainkan AS mampu menanamkan ide bahwa mereka adalah polisi dunia yang bertugas menjamin keamanan seluruh negara termasuk mereka yang menjadi sekutunya dimana dalam hal ini adalah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sebagai negara dengan kawasan terbesar di Asia Timur, penting bagi China untuk melakukan *counter-hegemony* dari AS untuk menjaga kepentingan mereka sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan pesat. China memandang bahwa AS di kawasan selama ini telah mengambil peranan yang terlalu berlebihan.

Misalnya, kerjasama militer AS dengan negara-negara di kawasan kerap mengancam perkembangan militer yang dilakukan China. Berangkat dari hal tersebut, China menggunakan kekuatan ekonominya untuk melakukan pengembangan militer yang masif, khususna pada PLAN. Berbagai strategi juga turut diluncurkan China agar mampu menggeser hegemoni *status quo*, seperti *Chain Island*. Konsep *chain island* memberikan pemahaman bahwa penting bagi China untuk menguasai perairan di kawasan agar mampu mengendalikan keamanan kawasan. Di LCS, China membangun beberapa pangkalan militer yang berteknologi tinggi dan hal ini dipandang mengancam bagi negara-negara sekutu AS. Sebagai hegemoni *status quo*, AS melakukan usaha *rebalancing* terhadap China mengingat AS telah berkomitmen untuk menjadi tameng dari negara-negara sekutunya di kawasan. Namun, interdependensi yang telah terbentuk antara AS dan negara-negara sekutunya dengan China membuat AS lebih memilih langkah *defensive realism*, seperti peningkatan kerjasama keamanan dengan negara-negara di kawasan dan bahkan dengan negara-negara di sekitar kawasan, seperti India dan Australia. Hal tersebut semakin memperkuat konsensus bahwa AS masih menjadi pemimpin keamanan di kawasan ini.

Untuk memenangkan *war of position*, China perlu membentuk *common sense* yang membuat negara-negara di Asia Timur tanpa tidak sadar mengikuti kebijakan mereka. Namun, hal tersebut memang merupakan sebuah revolusi yang akan memakan waktu lama. Pendekatan koersif yang selama ini China lakukan tidak dapat

mendefinisikan China sebagai pemimpin kawasan karena hegemoni tidak hanya sebatas menjadi *dominant power*. Namun, jika China benar-benar ingin menjadi pemimpin keamanan di kawasan dengan waktu yang lebih singkat, China dapat mengambil langkah yang bersifat realis dimana China harus mengajak AS ke *Thucydides Trap*. *Thucydides Trap* adalah sebuah kondisi dimana peperangan harus dilakukan sebagai sebab-akibat dari munculnya sebuah kekuatan besar yang berusaha untuk menggeser kekuasaan yang sudah ada (Allison, 2017). Namun, untuk melakukan peperangan membutuhkan danayang besar dan akan mengakibatkan kerugian yang besar pula. Selain itu, perlu pertimbangan matang bagi kedua sisi untuk mengambil langkah ini, khususnya bagi China; China harus mampu mengukur proyeksi untung-rugi mereka dengan kekuatan yang ada dibandingkan dengan kekuatan AS dan sekutunya. Secara singkat, seperti yang dikatakan Robert Cox, rivalitas AS-China ini berada pada kondisi dimana *the old is dying and the new cannot be born*.

REFERENSI

- Allison, G. T. (2017). *The Thucydides Trap*. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/2017/06/09/the-thucydides-trap/>
- America's Navy. (2013). *US, Australian Navies Conduct ASW Exercises during TS13*. <https://www.public.navy.mil/surfor/ddg88/Pages/USAustralianNaviesConductASWExercisesduringTS13.aspx>
- American Institute in Taiwan. (1979). *Taiwan Relations Act*. <http://ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/taiwan-relations-act/>
- Apthrop, C. (2012). *ASW Capabilities in the Asian Region*. Defense Review Asia. <https://defencereviewasia.com/anti-submarine-warfare/>
- Arbatov, A. (2014). *Enganging China in Nuclear Arms Control dalam The Global Think Tank*. Carnegie Moscow Centre.
- Arianto, A. R. (2016). Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di NATO dan Implikasinya Terhadap Agenda Keamanan Global Pasca Integrasi Prancis di Struktur Militer NATO. *Jurnal PIR*, 1(1).
- Bakry, U. S. (1990). *Pengantar Hubungan Internasional*. Jayabaya University Press.
- Booth, K., & Wheeler, N. J. (2007). *The Security Dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics*. Palgrave.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., & Weaver, O. (2003). *Regions and Power: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Calder, K., & Ye, M. (2010). *The Making of Northeast Asia*. Stanford University Press.
- Cato Handbook for Congress. (2002). *East Asian Defense Commitment*.
- Chang, F. K. (2013). *A Salutions To Arms: Asia's Military Build Up, Its Reason, and Its Implication*. Foreign Policy Research Institute.
- China Power. (n.d.). *What Does China Really Spend on its Military?* Center for Strategic and International Studies. <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Chow, G. C. (2011). *Memahami Dahsyatnya Ekonomi China*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Departemen Pertahanan AS. (2006a). *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China*.
- Departemen Pertahanan AS. (2006b). *Qudrennial Defence Review Report*.
- Departemen Pertahanan AS. (2010). *Annual Report to Congress: Military and Security*

- Developments Involving the People's Republic of China 2010.*
- Departemen Pertahanan AS. (2019). *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2019.*
- Dosch, J. (2004). The United States in the Asia Pasific. In M. K. Connors, R. Davidson, & J. Dosch (Eds.), *The New Global Politics of the Asia-Pacific*. Routledge.
- Hardy, J. (2013). *Japan's Navy: Sailing toward the Future*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2013/01/japans-navy-steaming-towards-the-future/>
- Huang, A. C. (2001). Transformation and Refinement of Chinese Military Doctrine: Reflection and Critique on the PLA's View. In J. C. Mulvenon & A. N. D. Yang (Eds.), *Seeking Truth From Facts: A Retrospective on Chinenese Military Studies in the Post-Mao Era*. Rand Coporation.
- Jack, P. C., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Abardin.
- Kim, C., & Jourdan, A. (2017). *Ghost Stores, Lost Billions As Korea Inc's China Woes Grow*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-southkorea-china/ghost-stores-lost-billions-as-korea-incs-china-woes-grow-idUSKCN1BN33V>
- Kumpulan Studi-Aspirasi. (2017). *Xi Jinping dengan pemikirannya mengenai Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru*. <http://kumpulanstudi-aspirasi.com/ekonomi/xi-jinping-dengan-pemikirannya-mengenai-sosialisme-dengan-karakteristik-china-untuk-era-baru/>
- Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Ilmu dan Metedologi*. LP3ES.
- Praditya, Y. (2013). *Strategi Penempatan Kekuatan Militer AS di Kawasan Asia Pasifik*. Asia-Pasific Security Module.
- Rachmat, A. N. (2017). Dinamika Keamanan Kawasan Asia-Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China & Amerika Serikat. *Dauliyah*, 2(2), 131-154.
- Reid, I. (2005). *A Public Opinion Survey Of Canadians And Americans About China*. Ipsos Reid.
- Rice, C. (2001). Campaign 2000: Promoting the National Interest. *Foreign Affairs*, 75(1), 56.
- Stashwick, S. (2019). *China's South China Sea Militarization Has Peaked*. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-militarization-has-peaked/>
- Sullivan, A., & Erickson, A. S. (2015). *The Big Story behind China's New Military Strategy*. The Diplomat. <http://thediplomat.com/2015/06/the-big-story-behind-chinas-new-military-strategy/>
- Tow, W., & Acharaya, A. (2007). *Obstinate or Obsolete? The US Alliance Structure in the Asia-Pacific* (No. 4).
- Tsuciyama, J. (2000). *Ironies in Japanese Defense and Disarmament Policy Japanese Foreign Policy Today*. Palgrave.
- Watson, A. (2002). *International Relations & The Practice of Hegemony*. University of Westminster.
- Y. S. Yoon. (2010). Negara Korea dan Pokok-Pokok Permasalahan. In M. Syamsuddin et. al (Ed.), *Politik dan Pemerintahan Korea*. INAKOS.
- Y. S. Yoon, & Mas'oeed, M. (2010). Politik Luar Negeri Korea. In M. Syamsuddin et. al (Ed.), *Politik dan Pemerintahan Korea*. INAKOS.
- Yale Law School. (1953). *Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea*. https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp
- Yusuf, S. (1989). *Hubungan Internasional & Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*. Pustaka Sinar Harapan.